



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada berbagai analisis strategis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah nyata dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan, semoga RENSTRA ini bermanfaat,terima kasih.



KEPALA PELAKSANA BPBD,

**H. SUDARMIN, SE., M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19670502 199703 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II : GAMBAR PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7</b>
2.1 Gambaran Pelayanan BPBD .....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD ..	27
2.1.2 Sumber daya BPBD .....	31
2.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD .....	35
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	47
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Layanan .....	47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPBD .....	49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan BPBD .....	49
2.2.2 Isu Strategis .....	52
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>54</b>
3.1 Tujuan .....	54
3.2 Sasaran .....	54
3.3 Strategis .....	56
3.4 Arah Kebijakan BPBD .....	57
<b>BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..</b>	<b>58</b>
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan .....	58
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusasn .....	93
4.2.1 Indikator Kinerja Utama .....	94
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	95
4.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal .....	96
4.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) .....	97
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	<b>99</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022	8
Tabel 2.2	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang	13
Tabel 2.4	Nama Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai upaten Sidenreng Rappang	15
Tabel 2.5	Tingkat Bahaya di Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel 2.6	Tingkat Kerentanan di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Tabel 2.7	Tingkat Kapasitas di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Tabel 2.8	Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel 2.9	Data Pegawai BPBD	31
Tabel 2.10	Jumlah ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin	32
Tabel 2.11	Jumlah Pejabat Struktural BPBD berdasarkan jenis kelamin	33
Tabel 2.12	Jumlah ASN BPBD berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	34
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Indikator SPM Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.15	Capaian Kinerja TPB/SDGs	39
Tabel 2.16	Capaian Kinerja tujuan dan sasaran tahun 2022-2023	41
Tabel 2.17	Pencapaian Kinerja pelayanan PD BPBD Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.18	Anggaran dan persentase realisasi belanja BPBD Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.19	Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD BPBD	49
Tabel 2.20	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
Tabel 2.21	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	53
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	55
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	56
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	57
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	59
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Musrenbang Renstra PD	63

Tabel 4.3	Rencana Program,kegiatan,subkegiatan dan pendanaan BPBD Tahun 2026-2030	81
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	93
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	94
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama	96
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	97
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal	98
Tabel 4.8	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjuta/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Gambar 2.2	Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	8
Gambar 2.3	Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	12
Gambar 2.5	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi	16
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	17
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Banjir	18
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang	19
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Kekeringan	20
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	21
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Kebakaran	22
Gambar 2.12	Peta Risiko Multi Ancaman	23

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1	Jumlah ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin	33
Grafik 2.2	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan jenis kelamin	34
Grafik 2.3	Jumlah ASN BPBD berdasarkan pendidikan jenis kelamin	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari sistem pemerintah daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menyusun kebijakan, rencana, dan program penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai ancaman bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan, Badan Penanggulangan Bencana daerah harus memiliki strategis yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, respons, serta pemulihan pascabencana.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yaitu "**MAJU DAN SEJAHTERA**" serta kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengalokasian sumber daya serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dokumen Renstrara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk evaluasi terhadap program dan kebijakan sebelumnya, analisis risiko bencana, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana dapat ditingkatkan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode perencanaan yang telah ditetapkan.



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Renstra ini menjadi instrumen perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana guna melindungi masyarakat serta meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Kesiapsiagaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi bencana melalui perencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta masyarakat;
2. Mengurangi risiko dan dampak bencana dengan menerapkan strategi mitigasi berbasis penelitian, teknologi, dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana, baik pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, maupun



pascabencana;

4. Mengembangkan sistem informasi dan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dibidang kebencanaan, baik ditingkat pemerintah daerah maupun masyarakat;
6. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan komunitas;
7. Memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk penanggulangan bencana, termasuk pendanaan, peralatan, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD**

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
- d. Kelompok sasaran layanan .

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

#### BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan; DAN KINERJA
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



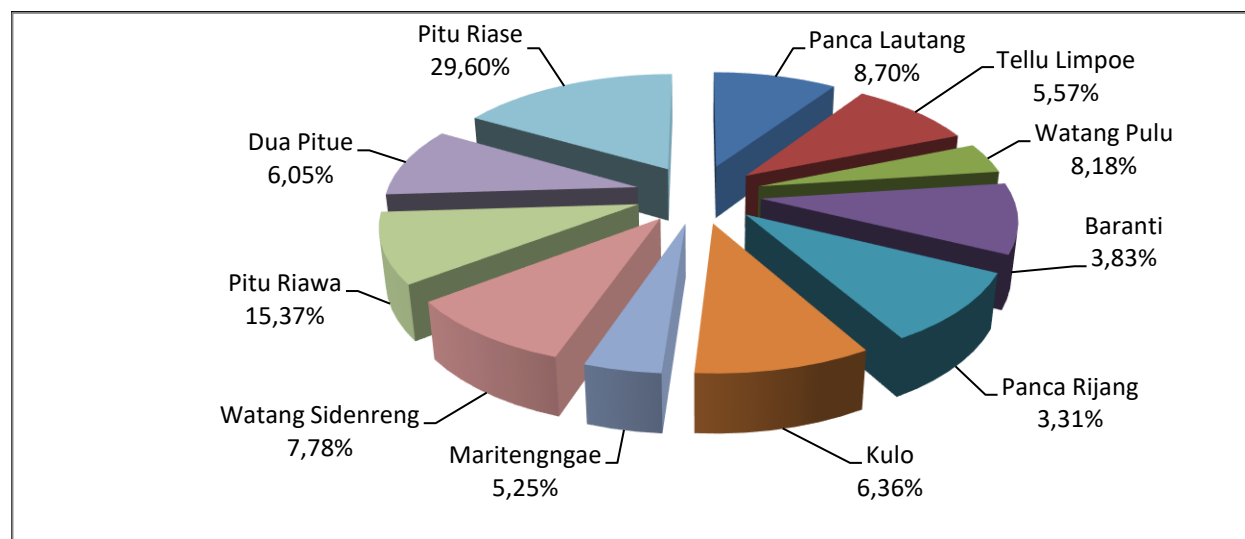
*Tabel 2.1.*  
*Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha)*  
*dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022*

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>188.325</b>	<b>38</b>	<b>68</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan MaritengngaE dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

*Gambar 2.2.*  
*Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022*



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

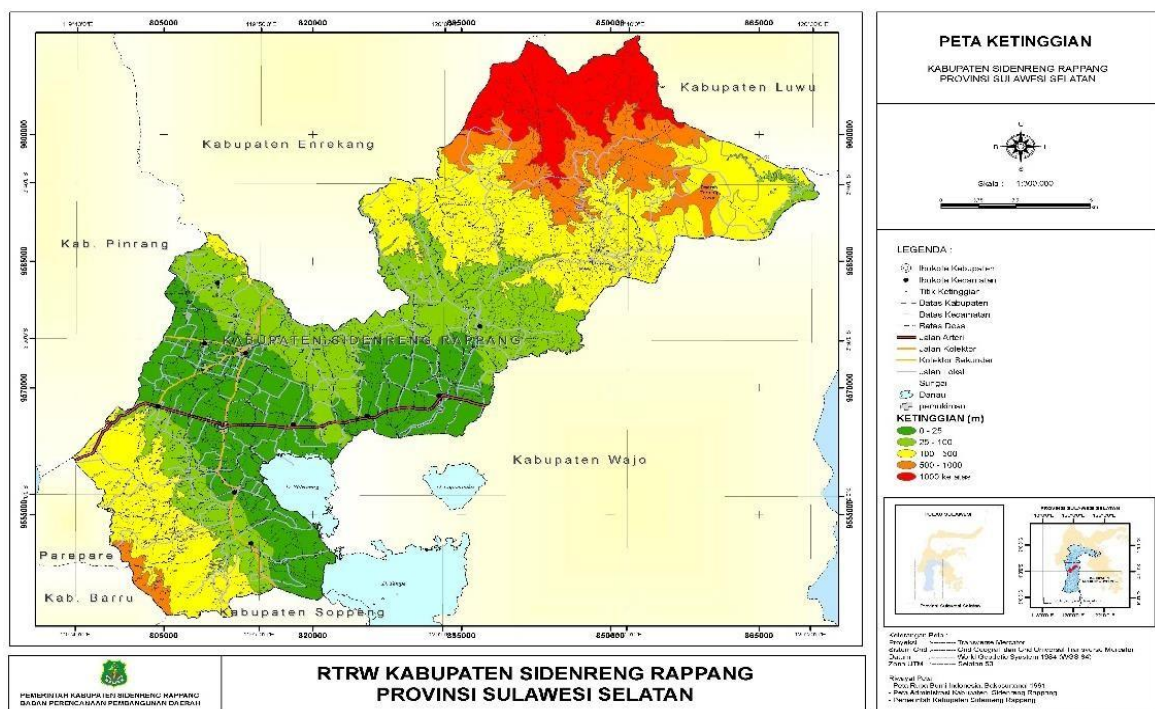
Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di diantara 3<sup>0</sup>43'– 4<sup>0</sup>09' Lintang Selatan dan 119<sup>0</sup>41'-120<sup>0</sup>10' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.

4. Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

*Gambar 2.3.  
Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang*



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

*Tabel 2.2.  
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				Total
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

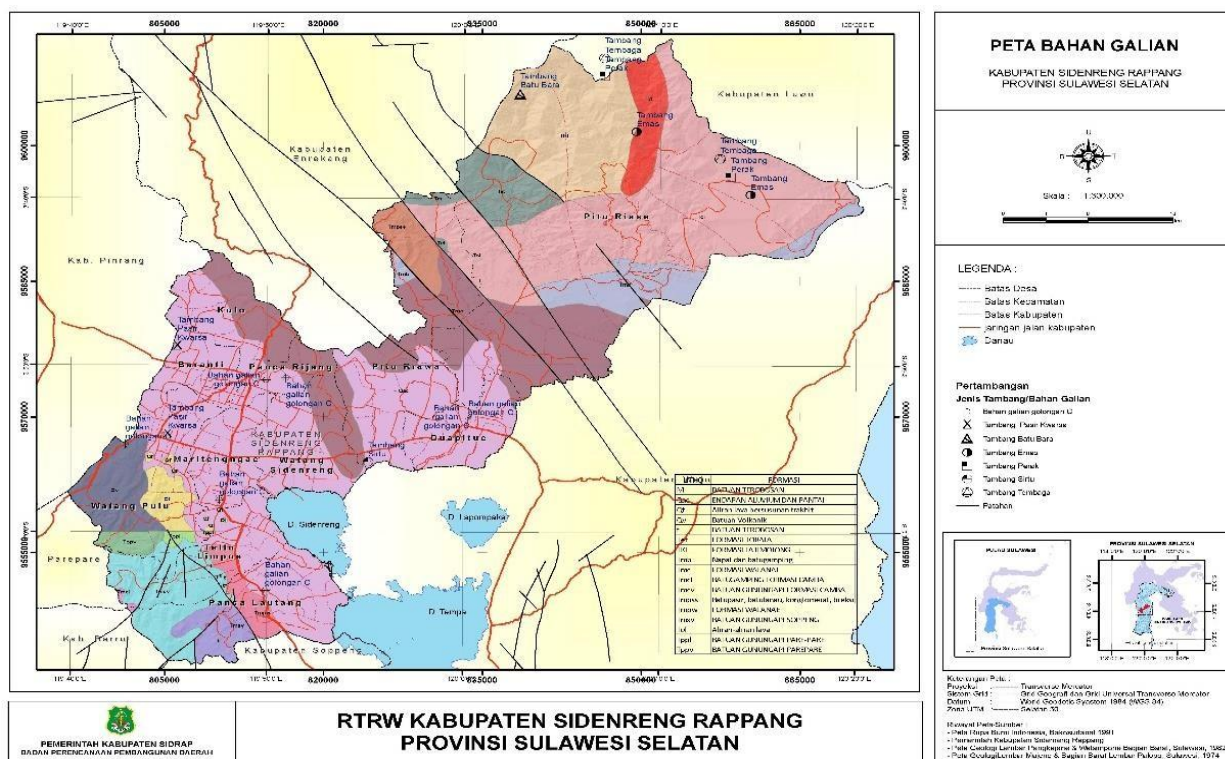
Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regosol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regosol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis

tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumosol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumosol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

**Gambar 2.4.**  
**Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang**



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.3.  
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang*

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Tanah</b>
1	Panca Lautang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol</li> <li>- Regosol Coklat</li> <li>- Alluvial Kekelabuan</li> <li>- Alluvial Hidromorf</li> </ul>
2	Tellu Limpoe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alluvial Kelabu Tua</li> <li>- Alluvial Hidromorf</li> <li>- Alluvial Colkat Kelabu</li> <li>- Regosol Coklat</li> </ul>
3	Watang Pulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regosol Coklat Kelabu</li> <li>- Grumesol Kelabu tua</li> <li>- Regosol Coklat</li> </ul>
4	Baranti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alluvial Kelabu Tua</li> <li>- Regosol Kekelabuan</li> <li>- Alluvial Hidromorf</li> </ul>
5	Panca Rijang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alluvial Kelabu</li> <li>- Padsolit Coklat</li> <li>- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan &amp; Regosol</li> </ul>
6	Kulo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regosol coklat kekelabuan</li> <li>- Podsolik merah kekuningan</li> </ul>
7	Maritengngae	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alluvial Kelabu Tua</li> <li>- Alluvial Coklat Kelabu</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grumesol Kelabu Tua</li> <li>- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan &amp; regosol</li> <li>- Regosol Coklat Kelabuan</li> </ul>
8	Watang Sidenreng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regosol Coklat Kelabuan</li> <li>- Podsolik merah kekuningan</li> <li>- Alluvial Coklat Kelabu</li> </ul>
9	Pitu Riawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alluvial Coklat Kelabu</li> <li>- Alluvial Hidromorf</li> </ul>
10	Dua Pitue	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alluvial coklat kelabu</li> <li>- Alluvial Hirdomorf</li> <li>- Padsolit Merah kekuningan</li> <li>- Kompleks padsolit coklat Kekuningan &amp; regosol</li> </ul>
11	Pitu Riase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan &amp; regusol</li> <li>- Podsolik coklat</li> <li>- Padsolit Merah kekuningan</li> </ul>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup; 2022

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.

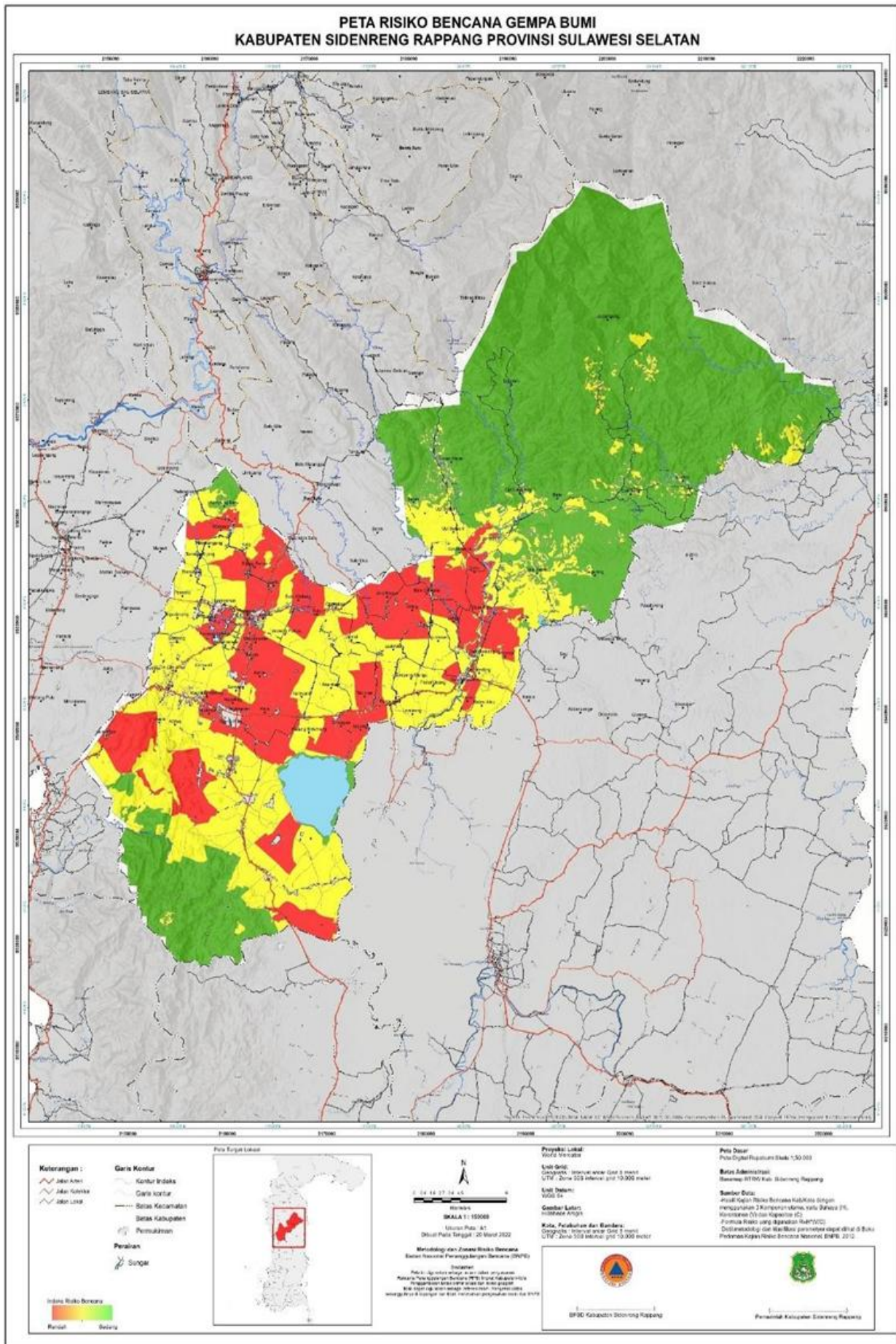
*Tabel 2.4.  
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>188.325</b>	<b>38</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas PSDA; 2022

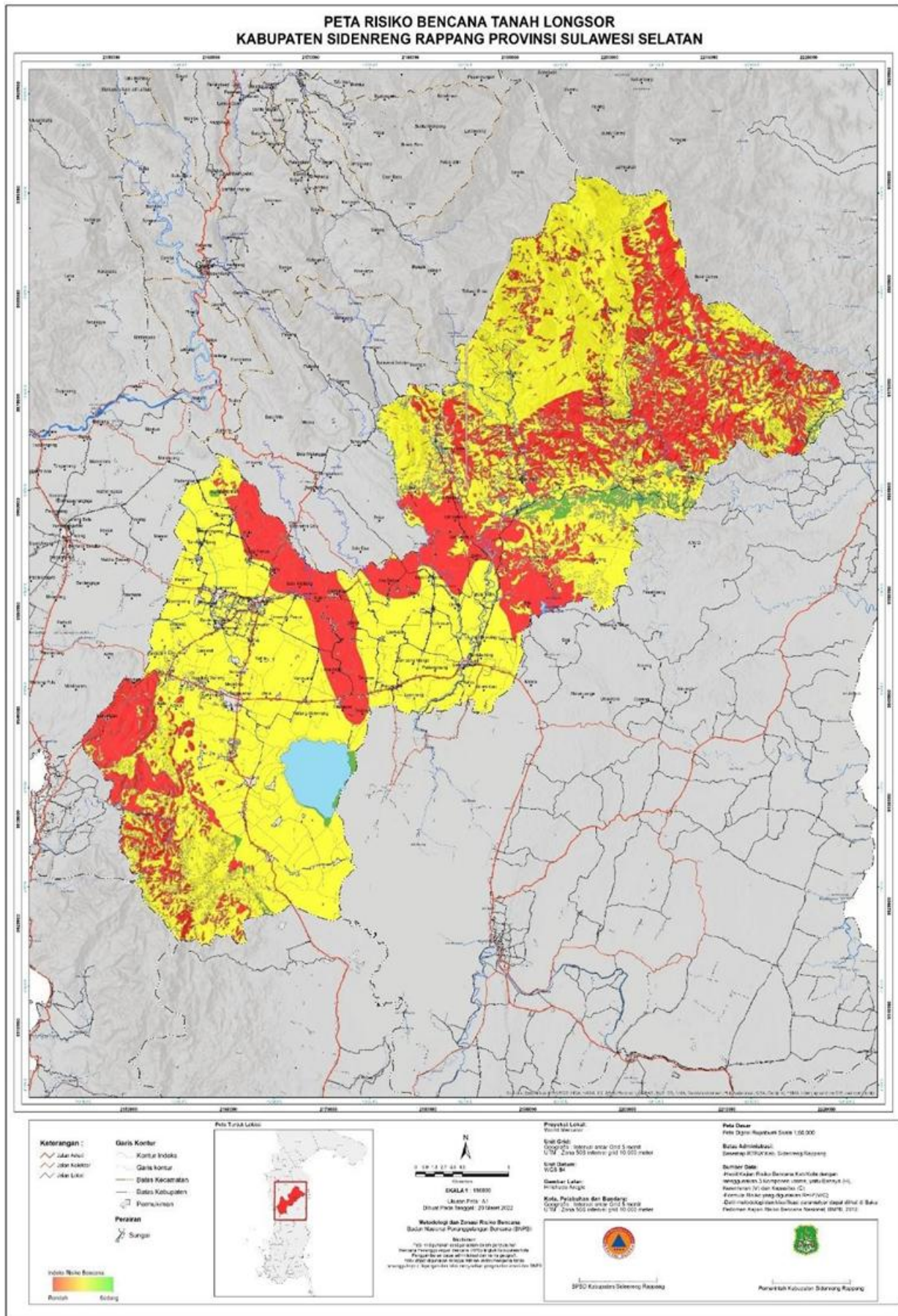
Peta risiko setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk setiap bencana yang mengancam. Berdasarkan peta risiko bencana dapat dilihat :

Gambar 2.5  
Peta risiko bencana gempa bumi



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

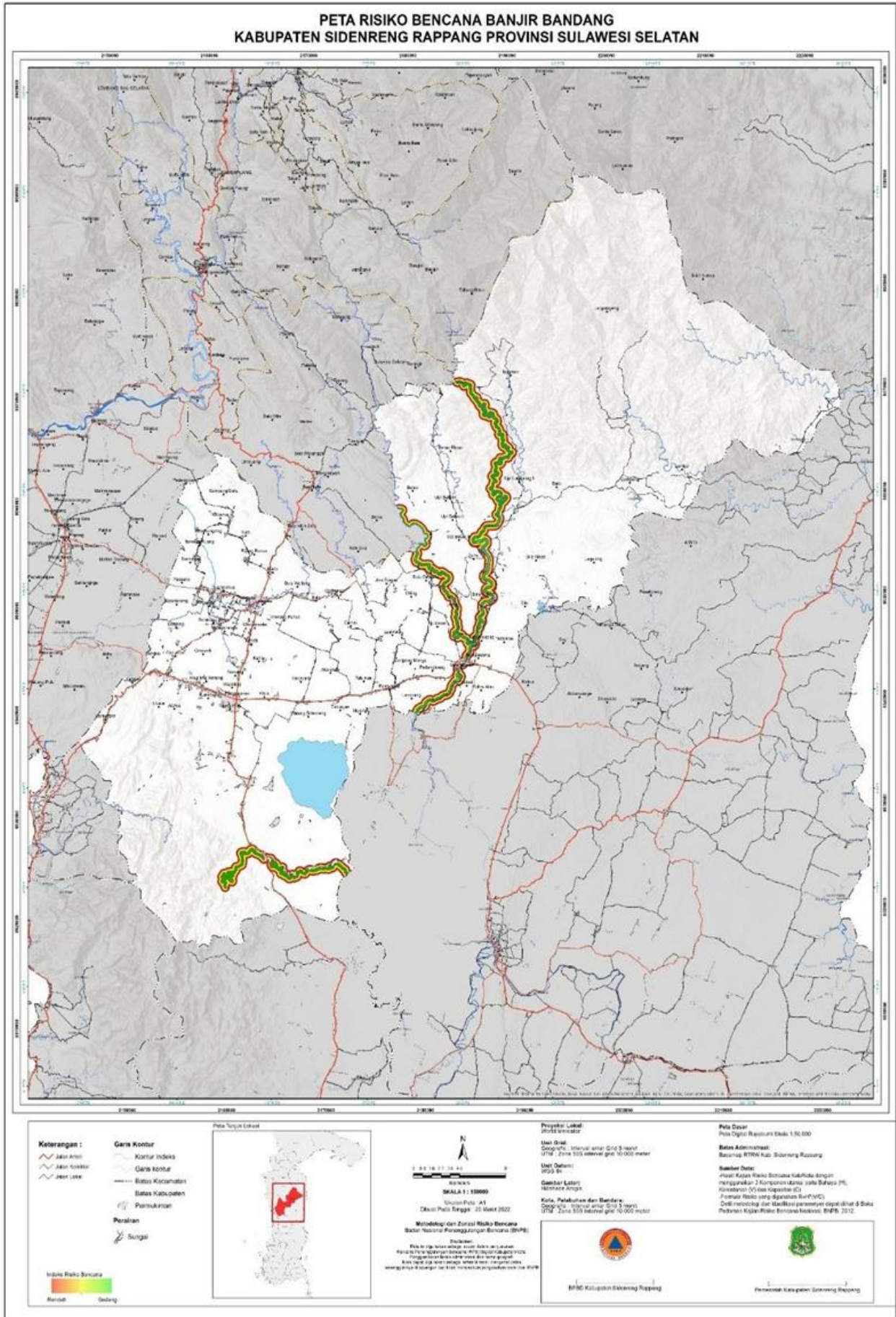
Gambar 2.6  
Peta risiko bencana tanah longsor



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

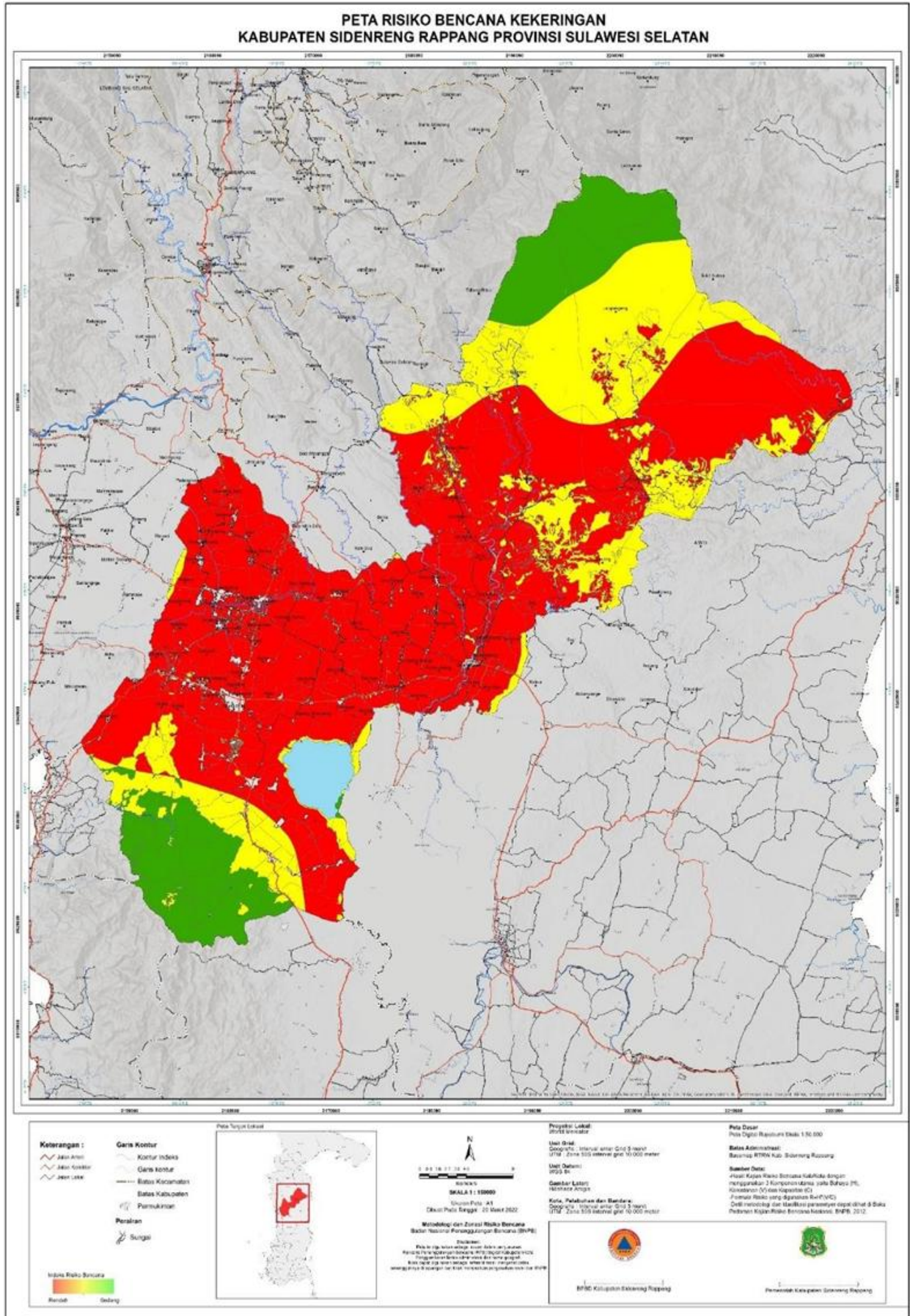


Gambar 2.8  
Peta risiko bencana banjir bandang



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

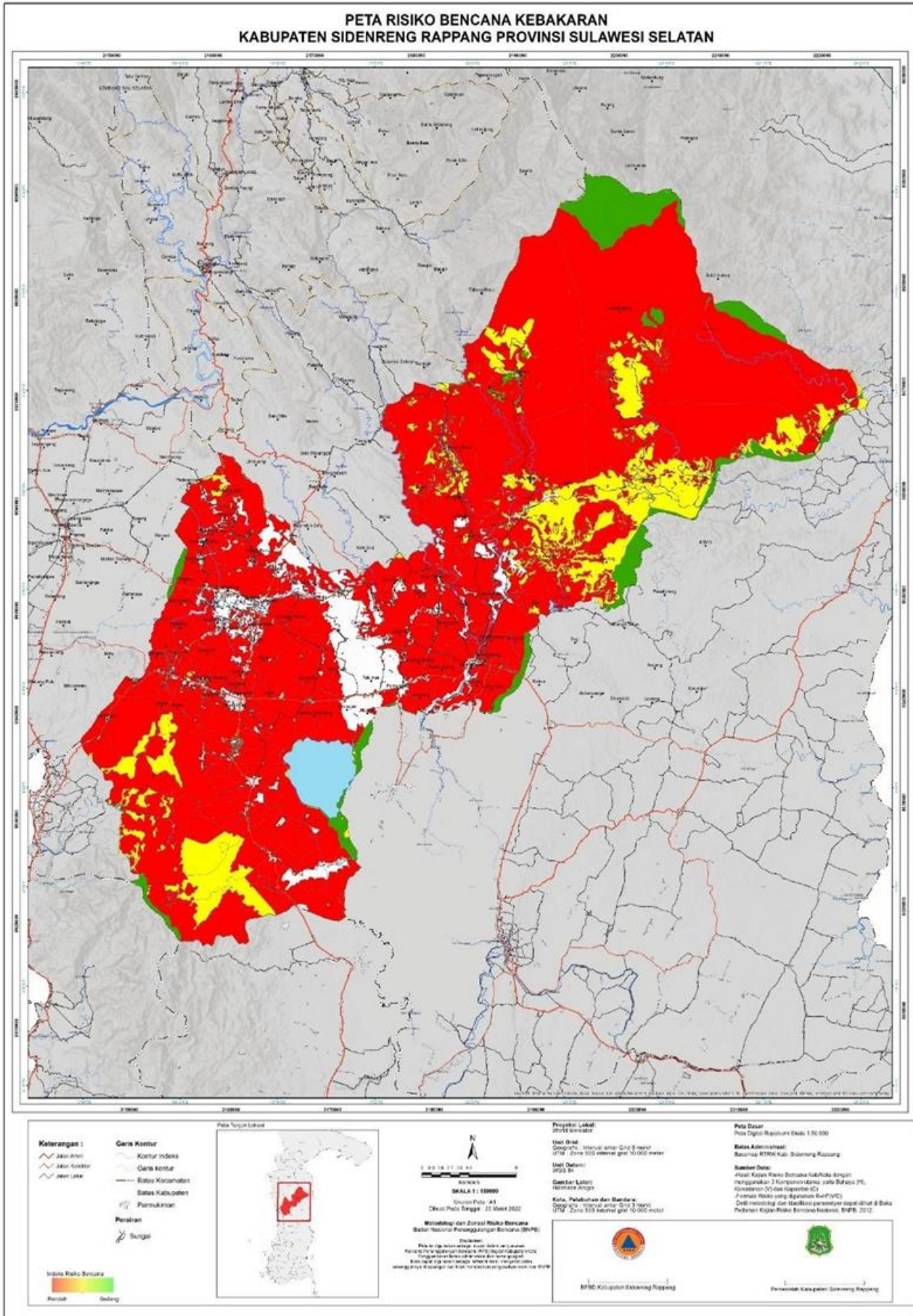
Gambar 2.9  
Peta risiko bencana kekeringan



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

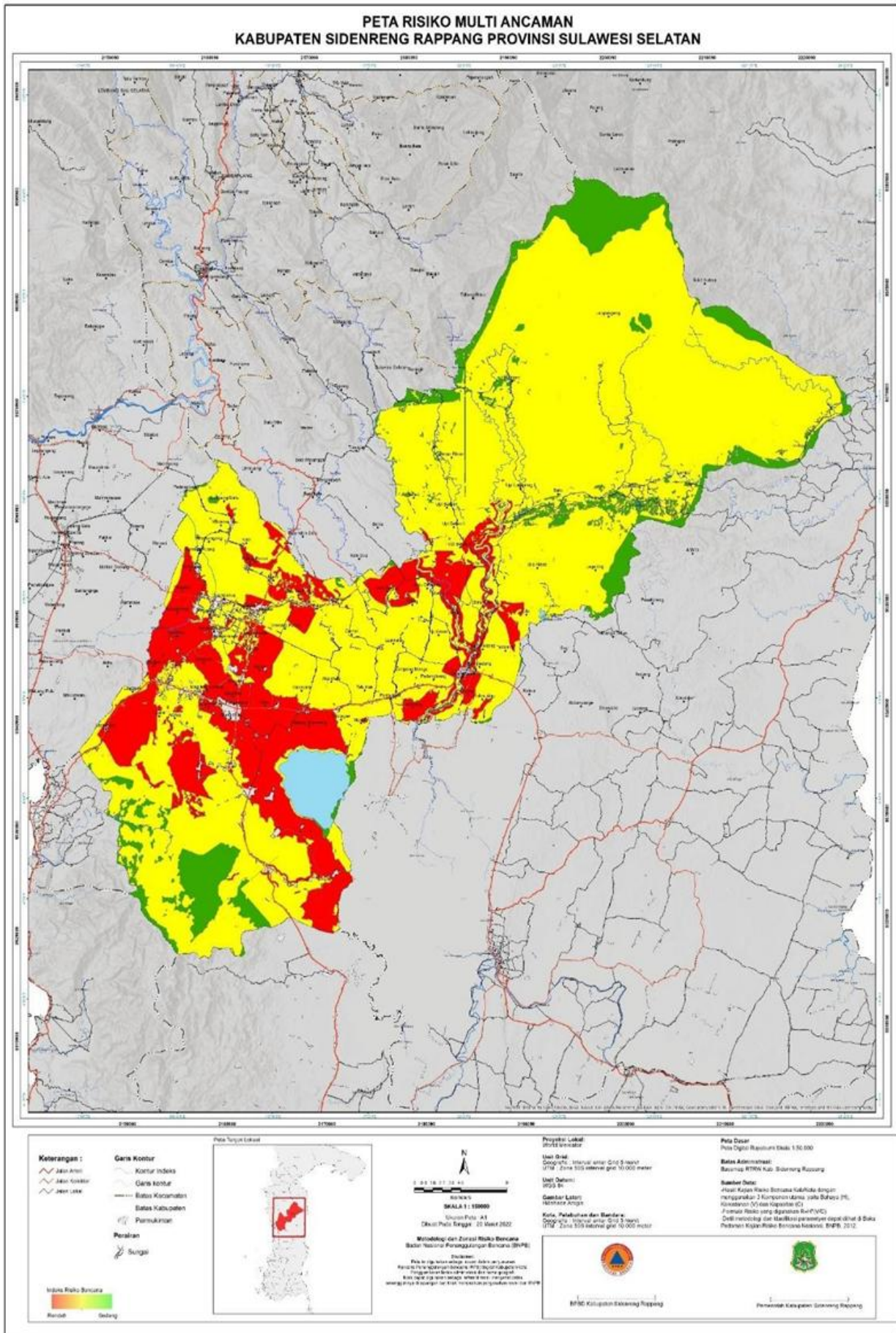


Gambar 2.11  
Peta risiko bencana kebakaran



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.12  
Peta risiko multi ancaman



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana serta untuk mengetahui kerusakan dan kebutuhan apabila bencana terjadi, maka diperlukan pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana. Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana di suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah.

Tingkat bahaya diperoleh dari nilai indeks dan kelas maksimal untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melihat jenis tingkat bahaya setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta bahaya. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.5*  
*Tingkat bahaya di Kabupaten Sidenreng Rappang*

BAHAYA			
No.	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1.	Cuaca Ekstrem	185.291,14	Tinggi
2.	Gempa Bumi	116.391,71	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	180.570,15	Tinggi
4.	Longsor	126.827,11	Sedang
5.	Kekeringan	164.691,52	Tinggi
6.	Banjir	19.111,98	Tinggi
7.	Banjir Bandang	5.455,32	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan pengkajian bahaya telah diperoleh tingkat bahaya pada masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tingkat bahaya tersebut yaitu sedang dan tinggi. Bencana yang berpotensi dengan tingkat bahaya sedang meliputi kekeringan, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi meliputi tanah longsor, banjir dan banjir bandang.

Tingkat kerentanan bencana diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian bencana. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan. Adapun tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.6*  
*Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian Rupiah	Kelas Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.	Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6.	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7.	Banjir Bandang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kerentanan untuk seluruh potensi bencana di kabupaten Sidenreng Rappang berada pada tingkat tinggi. Hasil ini didapatkan dari perhitungan nilai indeks dengan ketentuan yang telah diatur dalam penentuan tingkat kerentanan.

Tingkat kapasitas menunjukkan tingkat kemampuan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi ancaman bencana. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat dilihat pada peta kapasitas. Rekapitulasi hasil tingkat kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi ancaman bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.7*  
*Tingkat Kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
1.	Cuaca Ekstrem	Rendah	Rendah	Rendah
2.	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Rendah
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Rendah	Rendah
4.	Longsor	Rendah	Rendah	Rendah
5.	Kekeringan	Rendah	Rendah	Rendah
6.	Banjir	Rendah	Rendah	Rendah
7.	Banjir Bandang	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari perhitungan hasil ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Dengan diketahui tingkat kapasitas tersebut, maka kapasitas pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Untuk melihat tingkat risiko setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tingkat risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.8*  
*Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4.	Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana gempa, sedangkan potensi bencana lainnya memiliki tingkat risiko tinggi. Tingkat seluruh potensi bencana harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon II/b, 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III/b dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian setingkat eselon IV/a.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris :
  1. Subbagian Perencanaan
  2. Subbagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut :

##### **1) Kepala Pelaksana BPBD**

- a. Tugas :
  - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretaris**

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan badan penanggulangan bencana daerah di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## **3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

##### a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kedaruratan dan logistik;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

##### a. Tugas :

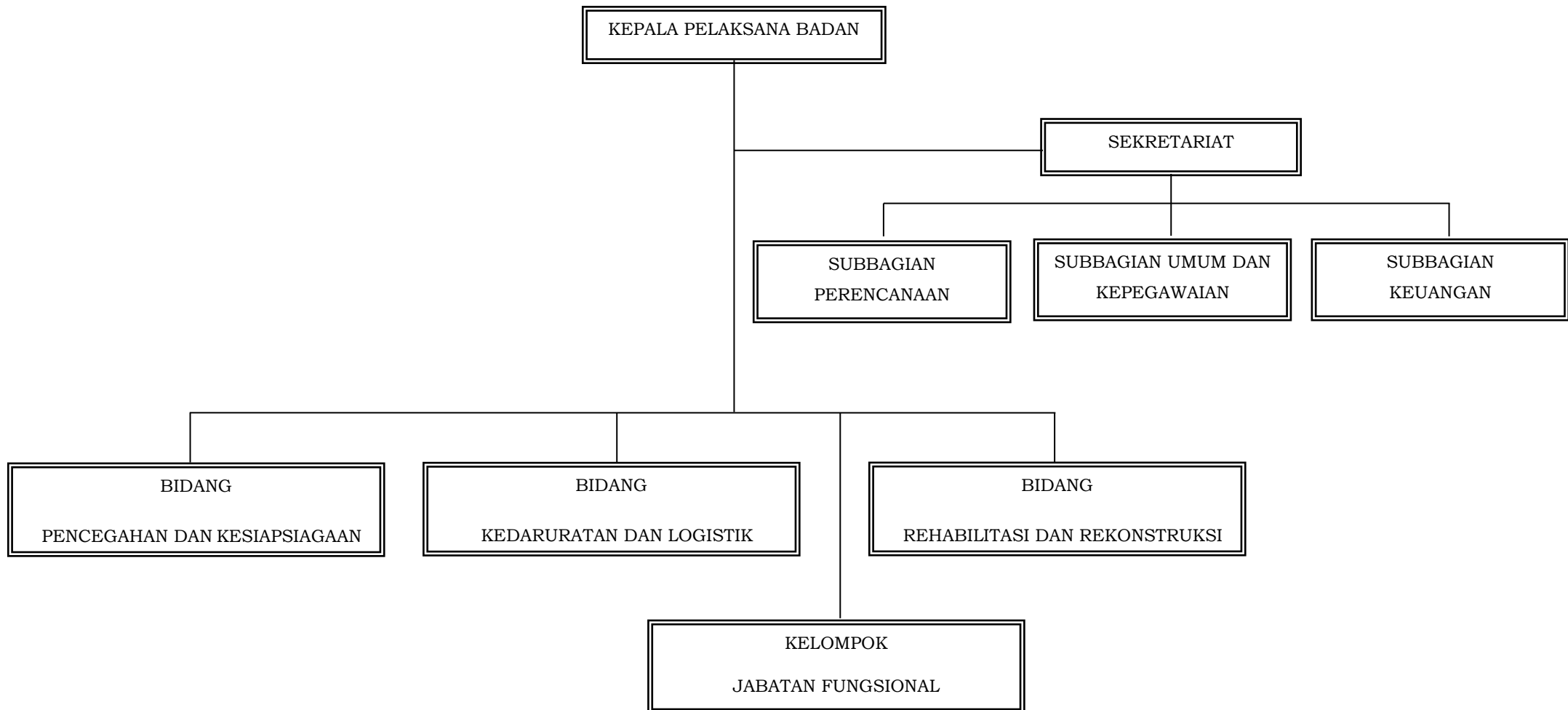
- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:

## BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



### 2.1.2. Sumber Daya BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, per 31 Desember 2024, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 15 (lima belas) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang.

Bila diurut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 (lima belas) orang, S2 sebanyak 2 (dua) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.9*  
*Data Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*

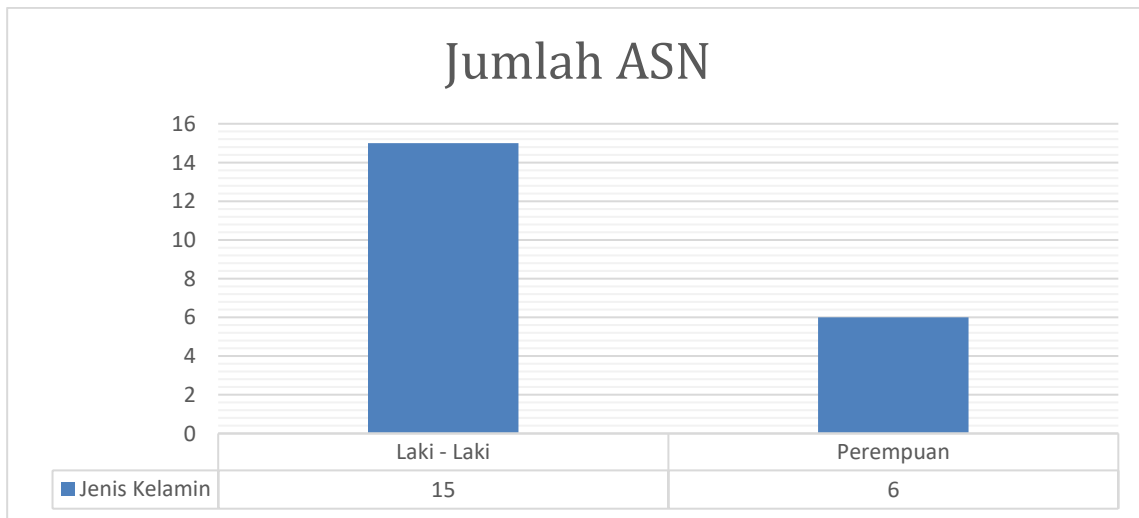
No.	Nama/Nip./Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	<b>H.SUDARMIN,SE.,M.Si</b> 19670502 199503 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Pelaksana Badan	S2
2	<b>MURSALIM HAMID, S.STP</b> 19790923 199112 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris	S1
3	<b>MUHAMMAD KASIM, S.Sos</b> 19790927 200801 1 008 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Perencanaan	S1
4	<b>MUH.RASYIDIN,S.IP</b> 19830824 200312 1 006 Penata Tk.I, III/d	Pengadministrasi Keuangan	S1
5	<b>ANDI ZAENAB, S.Sos</b> 19800105 200212 2 006 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Keuangan	S1
6	<b>ABD. HAMID</b> 19700428 200701 1 023 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Gaji	SMA Sederajat
7	<b>A.SAKINAH HASYIM, A.M.K</b> 19880826 201001 2 010 Pengatur Tk.I, II/d	Bendahara	D3
8	<b>HAMKA HANAFI</b> 19800427 201407 1 001 Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SMA Sederajat
9	<b>ERMAWATI P, S.IP</b> 19750525 200212 2 013 Penata, III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
10	<b>AGUSTINA, S.Sos</b>	Analisis Tata Usaha	S1

	19810830 200212 2 002 Penata, III/c		
11	<b>ANDI MALLE PUTE, S.Sos</b> 19720926 199403 1 006 Pembina, IV/a	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S1
12	<b>DAHARI, SH</b> 19710617 200604 1 014 Penata, III/c	Penyusun Rencana kebutuhan Logistik	S1
13	<b>MUHLIS,ST</b> 19820717 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
14	<b>MUSTAMIN,S.Sos</b> 19731231 200701 1 052 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
15	<b>SUARDI HASNAWI, S.Sos., MM</b> 19810202 200502 1 009 Penata Tk.I, III/d	Kabid Kedaruratan dan Logistik	S2
16	<b>ADNAN, SE</b> 19680305 199803 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
17	<b>ARDI ANUGRAH SAID</b> 19780126 201001 1 017 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	SMA Sederajat
18	<b>A.HERNAWATI NATSIR, S.Sos</b> 19780807 199803 2 004 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
19	<b>FIRMAN,SE</b> 19691101 200502 1 003 Pembina, IV/a	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S1
20	<b>IDHAM SAIRING, SE</b> 19720305 200312 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
21	<b>HERNY SAHAR, ST</b> 19730414 200604 2 024 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1

*Tabel 2.10*  
*Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Jenis Kelamin*

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	15
2	Perempuan	6
Jumlah		21

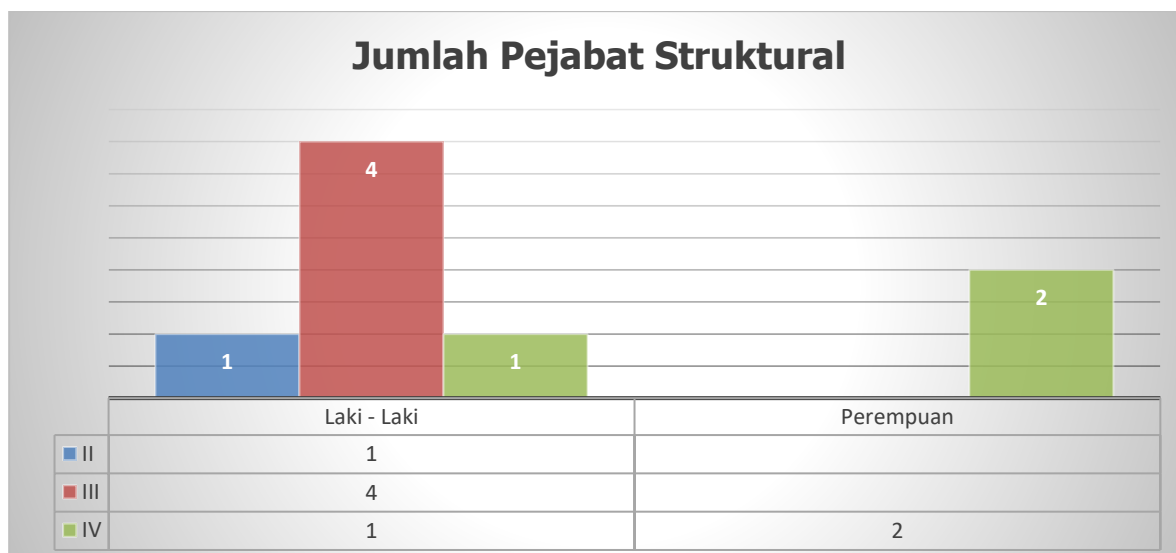
*Grafik 2.1*  
*Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Jenis Kelamin*



*Tabel 2.11*  
*Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Jenis Kelamin*

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	4	-	4
3	IV	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

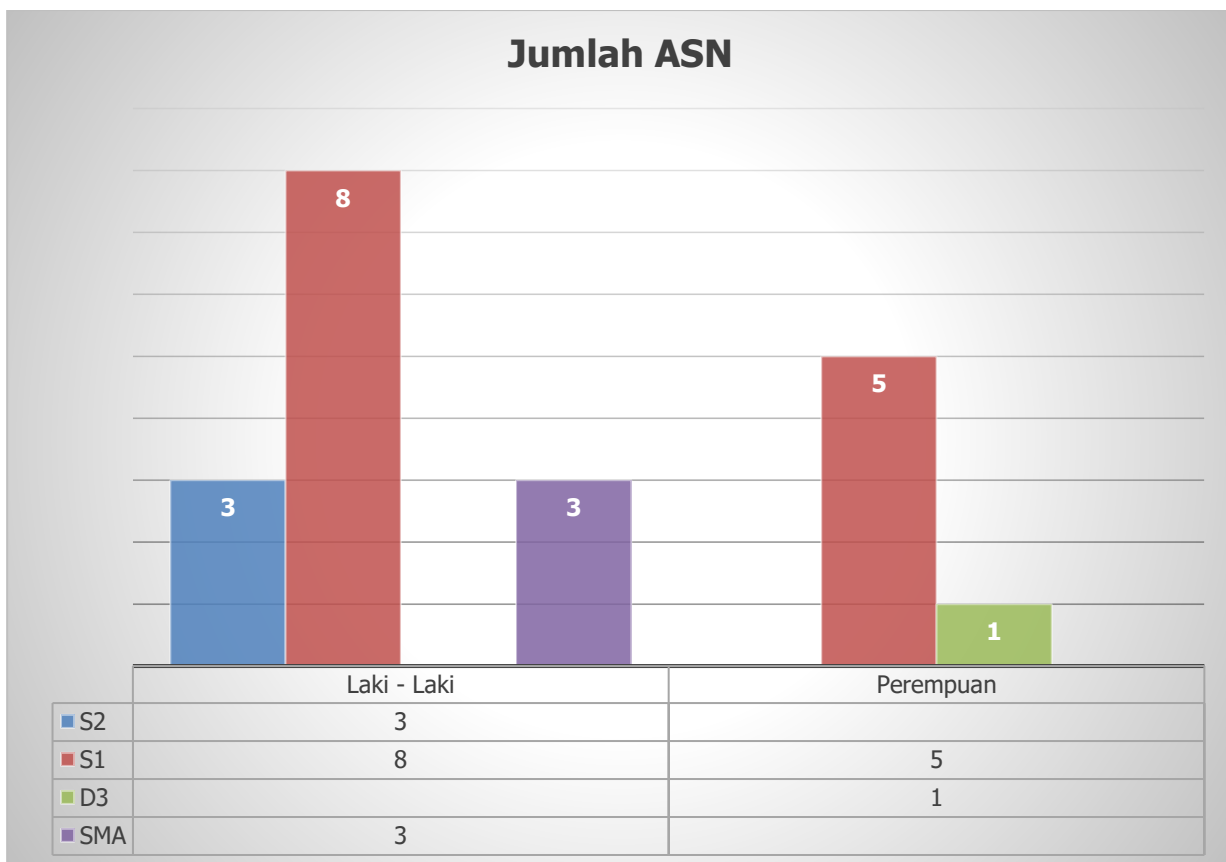
*Grafik 2.2*  
*Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Jenis Kelamin*



*Tabel 2.12*  
*Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin*

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S2	2	-	2
2	S1	10	5	15
3	D3	-	1	1
4	SMA	3	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>

*Grafik. 2.3*  
*Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*  
*Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin*



### 2.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai macam upaya dalam pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2020-2024) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana pada masyarakat dan pihak terkait;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Menyusun dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2022-2026;
- d. Menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten

Sidenreng Rappang 2023-2027;

- e. Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Pemantauan potensi bencana.

2. Kedaruratan dan Logistik

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya efektifitas sistem penanganan kedaruratan. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Pengembangan PUSDALOPS penanganan darurat bencana;
- c. Inventarisasi dan evaluasi logistik dan peralatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Identifikasi kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

**2.1.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 18**

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Permendagri 86 Tahun 2020 dengan capaian Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 2.13  
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun 2020-2024*

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024

I	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	243.116	55.036	66.617	51.567	937
1	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	%	86	95	96	89,01	90
II	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	247.859	14.483	52.727	51.175	1.087
1	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
3	Persentase Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Ikut Pelatihan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Warga Negara Yang Ikut Pelatihan	%	0	0	100	100	90
5	Persentase Warga Negara Yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana Dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	%	25	100	100	88,16	90
6	Persentase Warga Negara Yang Mendapat Peralatan Perlindungan	%	100	0	0	88,33	0

III	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	6.563	2.487	1.463	2.175	1.369
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status KLB	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana	%	100	86	100	100	100
3	Persentase Jumlah Petugas Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana	%	100	90	100	100	100
4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong Dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	%	100	100	100	20	100

### 2.1.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.14  
Capaian Indikator SPM 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi					Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
				2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TrantibumLinmas</b>									
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	76,08	95,01	96	89,01	90,59	Belum tercapai
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	77,31	90,12	91	88,33	90,59	Belum tercapai

		terhadap bencana							
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	91,16	84,42	94,75	2.175	57,14	Belum tercapai

### 2.1.3.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDG's)

Capaian target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (TPB/ SDG's) adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.15  
Capaian Target Indikator TPB/ SDG's Tahun 2020-2024*

No.	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
1.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0,02	0,02	0,01
2.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	10	4	9	2	3
3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	lokasi	0	4	24	5	6
4.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	12.375.865.000	5.365.088.000	5.365.088.000	20.425.900.000	33.507.000

5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	0	0	0
<b>No.</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)</b>		<b>Satuan</b>	<b>Capaian</b>				
	<b>No. Indi</b>	<b>Indikator</b>		<b>CP 2020</b>	<b>CP 2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP 2023</b>	<b>CP 2024</b>
1.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0,02	0,02	0,01
2.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	poin	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	sistem	0	0	0	0	0
4.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	12.375.865.000	5.365.088.000	5.365.088.000	20.425.900.000	33.507.000
<b>No.</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)</b>		<b>Satuan</b>	<b>Capaian</b>				
	<b>No. Indi</b>	<b>Indikator</b>		<b>CP 2020</b>	<b>CP 2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP 2023</b>	<b>CP 2024</b>
1.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	0	0	0
2.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0

#### 2.1.3.4 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Capaian Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.16*  
*Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2022-2023*

No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat	100%	100%	-	-
1.	<i>Predikat Nilai SAKIP OPD</i>	<i>61 (B)</i>	<i>64 (B)</i>	<i>64,85 (B)</i>	<i>64,15 (B)</i>
2.	<i>Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	<i>118,85</i>	<i>115,92</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>

*Tabel 2.17*  
*Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*  
*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*  
*Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	-	-	-			-	-	-			-	-	-
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	-	-	-			-	-	-			-	-	-
3	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100	100	-	-	-			-	-	-			-	-	-
4	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				100	100	-	-	-			-	-	-			-	-	-
8	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				-	-	100	100	100	-	-	89,42	96,96	98,70	-	-	0,89	0,97	0,99
9	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan				-	-	5	5	5	-	-	5	5	5	-	-	1,00	1,00	1,00
10	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				-	-	18	18	18	-	-	18	18	18	-	-	1,00	1,00	1,00
11	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum				-	-	12	12	12	-	-	12	10	12	-	-	1,00	0,83	1,00
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan				-	-	9	-	2	-	-	5	-	2	-	-	0,55	-	1,00



	pemerintahan daerah yang diadakan																		
12	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	-	12	12	12	-	-	12	12	12	-	-	1,00	1,00	1,00
13	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan				-	-	21	19	13	-	-	17	19	12	-	-	0,80	1,00	0,92
14	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana				100	100	100	100	-			96,78	80,12	-			0,97	0,80	-
15	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				100	100	100	100	100			100	89,01	100			1,00	0,89	1,00
16	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100	100	100	100	100			94,80	54,83	100			0,95	0,55	1,00
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100	100	100	100	100			95,53	96,53	100			0,96	0,96	1,00
18	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				-	-	-	-	100	-	-	-	-	937	-	-	-	-	0,937
19	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana				-	-	-	-	240	-	-	-	-	150	-	-	-	-	0,62



20	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	1.369	-	-	-	-	0,124
21	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana				-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1,00



Dari tabel 2.17 diatas dapat disimpulkan bahwa ada 9 indikator yang tercapai 100% dan target indikator tidak tercapai 100% sampai tahun 2024.

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai BPBD untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, mengalami dinamika naik turun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel 2.18 berikut.

**Tabel 2.18**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	442.524.000	-	-	-	-	427.036.492	-	-	-	-	96,50	-	-	-	-	88.504.800	85.407.298
Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur	93.910.000	-	-	-	-	93.900.000	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	18.782.000	755.219
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.579.000	-	-	-	-	4.579.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	915.000	915.000
Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	5.651.000	-	-	-	-	5.630.350	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-	1.130.200	1.126.070
Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	206.235.000	-	-	-	-	206.235.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	41.247.000	41.247.000
Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	99.702.000	-	-	-	-	99.702.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	19.940.400	19.940.000
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6.121.000	-	-	-	-	6.113.800	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	1.224.200	1.222.760
Program Penunjang Urusan Pemerintahan/Daerah Kab/Kota	-	2.423.343.000	2.823.883.500	2.276.657.000	2.511.473.700	-	2.362.469.733	2.151.567.303	2.124.519.589	2.470.725.924	-	97,49	76,19	93,32	98,38	2.007.071.440	1.821.856.510
Program Penanggulangan Bencana	-	-	600.856.500	435.315.000	292.198.300	-	-	345.527.800	310.005.200	271.678.500	-	-	57,51	71,21	92,98	265.673.960	185.442.300



#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai mandatnya dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana, maka kelompok sasaran layanan BPBD dirumuskan sebagai berikut:

##### **1. Masyarakat Umum di Wilayah Rawan Bencana**

Sasaran utama layanan edukasi, peringatan dini, evakuasi, dan bantuan darurat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan.

##### **2. Kelompok Rentan**

Termasuk di dalamnya anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui, yang memerlukan penanganan khusus dalam setiap fase penanggulangan bencana.

##### **3. Aparatur Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa**

Sebagai mitra strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan kebencanaan di tingkat lokal.

##### **4. Lembaga Pendidikan dan Generasi Muda**

Pelajar dan mahasiswa sebagai agen perubahan dan pelopor budaya sadar bencana melalui program edukasi kebencanaan dan sekolah/madrasah aman bencana.

##### **5. Relawan, Organisasi Sosial, dan LSM**

Pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana, serta penyebaran informasi kebencanaan.

##### **6. Pelaku Dunia Usaha dan Industri**

Sasaran kegiatan penyadaran risiko bencana dan pembentukan sistem manajemen keselamatan usaha dalam konteks ketangguhan bisnis berkelanjutan.

##### **7. Media Massa dan Jurnalis**

Sebagai mitra strategis dalam diseminasi informasi, edukasi publik, dan peningkatan literasi kebencanaan di masyarakat luas.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat daerah Dalam Pemberian Layanan**

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, BPBD menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai perangkat daerah. Kerja sama ini mencakup dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan kebencanaan.

Berikut adalah perangkat daerah yang menjadi mitra strategis BPBD dalam pemberian layanan:

1. Dinas Sosial

Mendukung penyediaan logistik, bantuan sosial bagi korban bencana, dan pengelolaan dapur umum.

2. Dinas Kesehatan

Memberikan layanan kesehatan darurat, penanganan korban luka, serta pengendalian penyakit pascabencana.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berperan dalam penanganan kerusakan infrastruktur dan pemulihan sarana prasarana pascabencana.

4. Dinas Perhubungan

Mendukung mobilisasi evakuasi dan pengaturan lalu lintas saat tanggap darurat bencana.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika

Menangani penyebaran informasi bencana, peringatan dini, dan komunikasi darurat.

6. Dinas Pendidikan

Melaksanakan edukasi kebencanaan di lingkungan sekolah dan mendukung program sekolah aman bencana.

7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Mendukung pengamanan wilayah terdampak dan pengendalian ketertiban umum selama tanggap darurat.

8. Dinas Lingkungan Hidup

Terlibat dalam mitigasi risiko bencana berbasis ekosistem serta rehabilitasi lingkungan pascabencana.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Sebagai mitra dalam integrasi kebijakan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Mendukung penyediaan pangan darurat dan pemulihan sektor pertanian pascabencana.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan BPBD

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan, Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
2. Belum adanya kebijakan yang mengatur pengarusutaman Penanggulangan Bencana dalam mata penghidupan pertanian dan perkebunan sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tingkat Pemerintah Daerah dan masyarakat belum optimal;
3. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas;
4. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana, Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

*Tabel 2.19*  
*Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
			Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana

			Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana
			Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
			Belum optimalnya rehabilitasi dan bantuan rekonstruksi kerusakan akibat bencana

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2025 – 2029 adalah **“Maju dan Sejahtera”**. Dan adapun Misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :**“Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan”**

Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang 2025 sampai dengan 2029 ditarget dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kapasitas ketahanan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi bencana. Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana yang merupakan wujud pencapaian visi, misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025-20239 tidak mungkin terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong.

*Tabel 2.20*

*Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Pengelolaan	Belum optimalnya upaya	1. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada	1. Semakin banyak terbentuk

<p>2</p> <p>3</p>	<p>Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran : Menurunnya tingkat risiko bencana</p>	<p>penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat</p>	<p>masyarakat di kawasan rawan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana</li> <li>3. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpanan logistik dan peralatan bencana</li> <li>4. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpanan logistik dan peralatan bencana</li> <li>5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana</li> <li>6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang</li> <li>7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten</li> </ol>	<p>organisasi masyarakat yang berbasis penanggulangan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terbentuknya Satgas penanggulangan bencana yang berkompeten</li> <li>3. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran</li> </ol>
-------------------	--	---	--	--

			<p>Sidenreng Rappang</p> <p>8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang</p> <p>9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang</p>	
--	--	--	--	--

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggungjawab OPD, dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat), memiliki daya ungkit pembangunan daerah, kemudahan untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa datang.

Permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam RPJMD 2025-2029 adalah belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah masih terjadinya resiko bencana.

Penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disimpulkan dari permasalahan layanan, isu KLHS, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Teknik menyimpulkan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas

dan fungsi dijabarkan pada tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerentanan dan Risiko Bencana</li> <li>2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Wilayah</li> </ol>	Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degradasi Lingkungan Hidup</li> <li>2. Peningkatan Risiko Bencana</li> <li>3. Perubahan Pola Curah Hujan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerentanan Wilayah Spesifik</li> <li>2. Minimnya Infrastruktur Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Risiko dan Frekuensi Bencana</li> <li>2. Minimnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat</li> <li>3. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana</li> </ol>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Menurunnya tingkat risiko bencana.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

➤ Tujuan :

1. Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2025-2029 adalah :

#### **3.2 Sasaran**

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya tingkat risiko bencana	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan	Nilai Indeks Risiko Bencana	116,15 (Sedang)	118,90 (Sedang)	118,40 (Sedang)	117,90 (Sedang)	117,40 (Sedang)	116,90 (Sedang)	116,40 (Sedang)	
		kebencanaan pada masyarakat	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai Sakip OPD	64,75 (B)	64,45 (B)	64,65 (B)	64,85 (B)	65,05 (B)	65,25 (B)	65,50 (B)	



### 3.3 Strategis

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut.

*Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Perangkat daerah*

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui implementasi program " Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui implementasi program " Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui implementasi program " Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui implementasi program " Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui implementasi program " Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
2. Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan

gan bencana daerah dan masyarakat menghadapi bencana	bencana daerah dan masyarakat menghadapi bencana	bencana daerah dan masyarakat menghadapi bencana	bencana daerah dan masyarakat menghadapi bencana	bencana daerah dan masyarakat menghadapi bencana
--	--	--	--	--

### 3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan arah kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel berikut.

*Tabel 3.3*

*Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah*

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan UU no. 24/27 dan RPB (Rencana Penanggulangan PBencana) 2. Menyediakan layanan darurat bencana 24 jam 3. SOP distribusi Logistik dan Evakuasi Korban 4. SOP Koordinasi dengan lintas sektor TNI, Polri, Dinkes, dll	1. Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" 2. Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat menghadapi bencana	1. Terselenggaranya operasional kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pascabencana 2. Peningkatan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Subkegiatan adalah komponen terkecil dalam suatu kegiatan, yang memiliki alokasi anggaran dan target pencapaian yang spesifik serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		230		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					3.911.086.453		4.408.611.378		4.183.224.426		4.276.515.776		4.180.752.907	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2.842.086.453	100	2.935.611.378	100	2.980.224.426	100	2.998.515.776	100	3.007.752.907	
Tercapainya Penyelenggaraan	Cakupan Penunjang	100	100	100	2.842.086.453	100	2.935.611.378	100	2.980.224.426	100	2.998.515.776	100	3.007.752.907	



Pemerintahan yang Efektif dan efisien	Urusan Pemerintahan Daerah (%)													
Program Penanggulangan Bencana					1.069.000.000		1.473.000.000		1.203.000.000		1.278.000.000		1.173.000.000	
Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi Bencana Melalui Sistem	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	1.069.000.000	100	1.473.000.000	100	1.203.000.000	100	1.278.000.000	100	1.173.000.000	
Penanggulangan Bencana yang Terpadu, Responsif, dan Berkelanjutan	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		



	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Total Keseluruhan					3.911.086.453		4.408.611.378		4.183.224.426		4.276.515.776		4.180.752.907	



Penentuan Program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), tujuan dan sasaran Renstra, *outcome* dan *ouput* beserta indikatornya. Teknis merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel 4.2 berikut:



Tabel 4.2

## Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Ket</b>
Menurunnya Tingkat Risiko Bencana	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya Layanan Kebencanaan pada Masyarakat			Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)		
					Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		
					Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.		
					Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
					Indeks Risiko Bencana		
Jumlah warga negara yang							

					memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
			Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Bencana Melalui Sistem Penanggulangan Bencana yang Terpadu, Responsif, dan Berkelanjutan		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan	Jumlah Dokumen Rencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan	



				penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani	Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Terbentuknya sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, responsif, dan berbasis risiko	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	



					pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	



					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan	



					Bencana	Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terbentuknya sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, responsif, dan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan	



					Bencana	Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	

						Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

				Pajaknya		Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



				Semesteran SKPD			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Berdasarkan hasil perumusan program/kegiatan/subkegiatan pada tabel 4.2, maka adapun daftar program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
    1. Pengadaan Meubel
    2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
    1. Penyediaan jasa surat menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana Daerah :
  1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
    1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
  2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
    1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
    2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    3. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
    5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
    7. Penyusunan Rencana Kontijensi
    8. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    9. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    10. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
    1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas
    2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
    3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
    4. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
    5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
    6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
    7. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
    1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
    2. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
    3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
    4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

5. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

6. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota



*Tabel 4.3*  
*Rencana Program / Kegiatan / SubKegiatan Per Lokasi dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*

Bidang Urusan/Program/Outcome/Ke giatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2.842.086.453	100	2.935.611.378	100	2.980.224.426	100	2.998.515.776	100	3.007.752.907	BPBD	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	BPBD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dok	10.000.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	10.000.000	BPBD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	BPBD	

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD <b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>		<b>18 Lap</b>	<b>2.177.454.000</b>	<b>18 Lap</b>	<b>2.220.978.825</b>	<b>18 Lap</b>	<b>2.265.591.973</b>	<b>18 Lap</b>	<b>2.283.883.323</b>	<b>18 Lap</b>	<b>2.293.120.454</b>	<b>BPBD</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22/12 Org/Bln	2.162.454.000	22/12 Org/Bln	2.205.978.825	22/12 Org/Bln	2.250.591.973	22/12 Org/Bln	2.268.883.323	22/12 Org/Bln	2.278.120.454	BPBD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD		12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.000.000	BPBD	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Waktu pelaksanaan administrasi umum</b>		<b>12 Lap</b>	<b>162.000.000</b>	<b>12 Lap</b>	<b>212.000.000</b>	<b>12 Lap</b>	<b>212.000.000</b>	<b>12 Lap</b>	<b>212.000.000</b>	<b>12 Lap</b>	<b>212.000.000</b>	<b>BPBD</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	BPBD	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 Lap	7.000.000	10 Lap	7.000.000	10 Lap	7.000.000	10 Lap	7.000.000	10 Lap	7.000.000	BPBD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		40 Lap	150.000.000	40 Lap	200.000.000	40 Lap	200.000.000	40 Lap	200.000.000	40 Lap	200.000.000	BPBD	



	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang diadakan</b>		<b>10 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>10 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>10 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>10 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>10 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>BPBD</b>	
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan		3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	BPBD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	150.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	150.000.000	BPBD	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>136.526.453</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>136.526.453</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>136.526.453</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>136.526.453</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>136.526.453</b>	<b>BPBD</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		18 Lap	20.000.000	18 Lap	20.000.000	18 Lap	20.000.000	18 Lap	20.000.000	18 Lap	20.000.000	BPBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	26..526453	12 Lap	26..526453	12 Lap	26..526453	12 Lap	26..526453	12 Lap	26..526453	BPBD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		12 Lap	90.000.000	12 Lap	90.000.000	12 Lap	90.000.000	12 Lap	90.000.000	12 Lap	90.000.000	BPBD	



	Umum Kantor yang Disediakan													
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan</b>		<b>13 Unit</b>	<b>151.106.000</b>	<b>13 Unit</b>	<b>151.106.000</b>	<b>13 Unit</b>	<b>151.106.000</b>	<b>13 Unit</b>	<b>151.106.000</b>	<b>13 Unit</b>	<b>151.106.000</b>	<b>BPBD</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		12 Unit	86.106.000	12 Unit	86.106.000	12 Unit	86.106.000	12 Unit	86.106.000	12 Unit	86.106.000	BPBD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	BPBD	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi		2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	BPBD	
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>BPBD</b>	



	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100 Persen	1.069.000.000	100 Persen	1.473.000.000	100 Persen	1.203.000.000	100 Persen	1.278.000.000	100 Persen	1.173.000.000		
	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		35.000 Org	30.000.000	35.000 Org	30.000.000	35.000 Org	30.000.000	35.000 Org	30.000.000	35.000 Org	30.000.000	BPBD	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman		100 Org	30.000.000	100 Org	30.000.000	100 Org	30.000.000	100 Org	30.000.000	100 Org	30.000.000	BPBD	



	bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun													
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>		<b>35.000 Org</b>	<b>624.000.000</b>	<b>35.000 Org</b>	<b>730.000.000</b>	<b>35.000 Org</b>	<b>590.000.000</b>	<b>35.000 Org</b>	<b>590.000.000</b>	<b>35.000 Org</b>	<b>590.000.000</b>	<b>BPBD</b>	
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani		1 Keg	30.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	BPBD	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		3 Unit	107.000.000	3 Unit	150.000.000	3 Unit	150.000.000	3 Unit	150.000.000	3 Unit	150.000.000	BPBD	



Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		150 Org	30.000.000	150 Org	10.000.000	150 Org	10.000.000	150 Org	10.000.000	150 Org	10.000.000	BPBD	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		10 Keluarga	5.000.000	10 Keluarga	5.000.000	10 Keluarga	5.000.000	10 Keluarga	5.000.000	10 Keluarga	5.000.000	BPBD	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		2 Kawasan	7.000.000	2 Kawasan	10.000.000	2 Kawasan	10.000.000	2 Kawasan	10.000.000	2 Kawasan	10.000.000	BPBD	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		11 Org	130.000.000	11 Org	150.000.000	11 Org	150.000.000	11 Org	150.000.000	11 Org	150.000.000	BPBD	
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi		1 Dok	50.000.000	1 Dok	170.000.000	1 Dok	170.000.000	1 Dok	170.000.000	1 Dok	170.000.000	BPBD	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan maklumat pelayanan		1 Lap	105.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	BPBD	



	yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada													
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	BPBD	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		4 Kawasan	100.000.000	4 Kawasan	70.000.000	4 Kawasan	70.000.000	4 Kawasan	70.000.000	4 Kawasan	70.000.000	BPBD	
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>		<b>800 Org</b>	<b>310.000.000</b>	<b>780 Org</b>	<b>383.000.000</b>	<b>720 Org</b>	<b>353.000.000</b>	<b>600 Org</b>	<b>428.000.000</b>	<b>580 Org</b>	<b>323.000.000</b>	<b>BPBD</b>	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa		1 Lap	60.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	BPBD	



	Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas													
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dok	60.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	BPBD	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		5 Org	60.000.000	5 Org	28.000.000	5 Org	28.000.000	5 Org	28.000.000	5 Org	28.000.000	BPBD	
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal		1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	10.000.000	BPBD	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat		114 Org	10.000.000	100 Org	10.000.000	100 Org	10.000.000	100 Org	45.000.000	100 Org	10.000.000	BPBD	



	dalam aspek manajerial dan teknis													
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		800 Org	50.000.000	760 Org	230.000.000	720 Org	200.000.000	600 Org	200.000.000	580 Org	170.000.000	BPBD	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		1 Lap	60.000.000	1 Lap	40.000.000	1 Lap	40.000.000	1 Lap	40.000.000	1 Lap	40.000.000	BPBD	
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>5 Dok</b>	<b>105.000.000</b>	<b>5 Dok</b>	<b>330.000.000</b>	<b>5 Dok</b>	<b>230.000.000</b>	<b>5 Dok</b>	<b>230.000.000</b>	<b>5 Dok</b>	<b>230.000.000</b>	<b>BPBD</b>	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dok	20.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	BPBD	
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 Dok	20.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	BPBD	



Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia		1 Dok	20.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	BPBD	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1 Lap	10.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	BPBD	
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan		1 Dok	20.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	BPBD	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		1 Dok	15.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	BPBD	



Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana secara terukur dan terarah. IKD BPBD menjadi instrumen strategis dalam menilai efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

IKD inidiselaraskan dengan arah kebijakannasional, prioritas pembangunan daerah, serta dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra BPBD. Penentuan IKD mempertimbangkan urgensi, relevansi, serta konstibusinya terhadap peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana.

Secara umum, IKD BPBD difokuskan pada indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan, mempercepat waktu tanggap darurat, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada saat terjadi bencana. Beberapa Indikator Utama yang digunakan dalam IKD BPBD sesuai pada Tabel 4.3 IKD :

Tabel 4.3 IKD

## Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	Satuan	Basline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	0	118,90	118,40	117,90	117,40	116,90	116,40	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	90,59	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	90,59	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	33,17	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.087	35	35	35	35	35	35	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.369	960	960	960	960	960	960	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	937	35	35	35	35	35	35	

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, maka berikut diuraikan daftar subkegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 pada tabel 4.4.

*Tabel 4.4*

*Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*

<b>No</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Ket</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Ancaman Bencana)</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>2.2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota</li> <li>2.3. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota</li> <li>2.4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>2.5. Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>2.6. Penyusunan Rencana Kintijensi Kabupaten/Kota</li> <li>2.7. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota</li> <li>2.8. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</li> <li>3.2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota</li> <li>3.3. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> </ol>	

			3.4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3.5. Aktivasi Sistem Komando Penanggulangan Bencana	
--	--	--	---	--

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.

Siklus penanggulangan bencana dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana diselenggarakan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama BPBD

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

*Tabel 4.5*  
*Indikator Kinerja Utama*  
*Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Indikator	Satuan	Basline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Indeks	116,15 (sedang)	118,90 (sedang)	118,40 (sedang)	117,90 (sedang)	117,40 (sedang)	116,90 (sedang)	116,40 (sedang)	
3	Nilai Sakip	Poin	64,75 (B)	64,45 (B)	64,65 (B)	64,85 (B)	65,05 (B)	65,25 (B)	65,50 (B)	
4	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator kinerja kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut

*Tabel. 4.6*  
*Indikator Kinerja Kunci*  
*Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	937	35	35	35	35	35	35	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	1.087	35	35	35	35	35	35	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Orang	1.369	960	960	960	960	960	960	

#### 4.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana disajikan pada tabel berikut :

*Tabel. 4.7*  
*Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal*  
*Sub urusan Bencana Tahun 2025-2029*

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	89,01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	54,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Bencana								
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	96,53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (TPB/ SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/ SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penetapan target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (TPB/ SDGs) disajikan pada tabel berikut :

*Tabel. 4.8*  
*Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) Tahun 2025-2029*

No.	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun ke-					
	No. Indi	Indikator			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

2.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	3	7	10	12	14	15	15
3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	lokasi	6	15	20	22	24	25	25
4.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	33.507.000						
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	1	1	1	1	1	1
<b>No.</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)</b>		<b>Satuan</b>							
	<b>No. Indi</b>	<b>Indikator</b>								
1.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	poin	119,20	118,40	117,90	117,40	116,90	116,40	116,40
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	sistem	0	1	1	1	1	1	1
4.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	33.507.000						
<b>No.</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)</b>		<b>Satuan</b>							
	<b>No. Indi</b>	<b>Indikator</b>								
1.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	1	1	1	1	1	1
2.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis merupakan langka awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sidenreng Rappang, Renstra Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan, sasaran dan keterpaduan serta komonikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, sudah barang tentu Rencana Stategis (Renstra) ini tetap terbuka untuk langka – langka menyempurnakan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masa mendatang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan kebijakan dan perumusan program 5 tahun kedepan (2025-2029).

***"Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan"***

Pangkajene Sidenreng, 29 September 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD



**H.SUDARMIN,SE.,M.Si**

Nip. 19670502 199503 1 003



